

**HUBUNGAN PENDAPATAN PERKAPITA DAN
SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
TAHUN 2005-2016**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Agistya Citra Kusumaning Ayu
NIM 125030402111007**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

**HUBUNGAN PENDAPATAN PERKAPITA DAN
SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
TAHUN 2005-2016**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Agistya Citra Kusumaning Ayu
NIM 125030402111007**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Al insyirah : 6)

"Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong mu"

(Al Baqarah : 153)

“Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini”

(sabda Rasulullah SAW)

“Jangan pernah menunda sampai besok apa yang bisa Anda lakukan hari ini”

(Thomas Jefferson)

“Jangan hanya jadi pendengar, jadilah pelaku !”

(Sofie Designer)

“Untuk menjadi yang terbaik, haruslah berlatih.”

(Kristin Ratnawati)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2005-2016”. Tidak lupa peneliti haturkan shalawat dan salam kepada Rasul Allah SWT, pembawa kabar bahagia Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr., S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Komisi Pembimbing, yang dengan sabarnya membimbing dan membantu saya sampai selesai. Saya sangat berterima kasih.
 5. Kedua orang tua saya, Mbak Ning dan kedua adik saya Fanny dan Lutfi yang senantiasa terus-menerus mendoakan dan memberikan dukungan.
 6. Mas Sofie yang senantiasa menjadi penyemangat dan memacu dalam kondisi apapun, suka maupun duka. Motivator dikala mengalami krisis semangat.
 7. Teman-teman perpajakan angkatan 2012 dan teman-teman *DO Addict* yang telah membantu saya untuk terus maju dan berjuang bersama.
 8. Dan seluruh pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 13 Maret 2018

Peneliti

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Hubungan Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Sertifikat
Bank Indonesia terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Tahun 2005-2016

Disusun oleh : Agistya Citra Kusumaning Ayu

NIM : 125030402111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 13 Maret 2018
Komisi Pembimbing

Yuniadi Mayowan.S.Sos.,MAB

NIP. 197506142008121002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Juli 2018

Jam : 12.00-13.00 WIB

Skripsi atas nama : Agistya Citra Kusumaning Ayu

Judul : **Hubungan Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2005 – 2016**

Dan dinyatakan LULUS.

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Yuniadi Mayowan.S.Sos.,MAB
NIP. 197506142008121002

Anggota,

Mirza Maulinarhadi R, SE., MSA.Ak
NIP. 2012018412112000

Anggota,

Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA.Ak
NIP. 19861117 2015042002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 13 Maret 2018




Agistya Citra Kusumaning Ayu
125030402111007

RINGKASAN

Agistya Citra Kusumaning Ayu, 2018. **Hubungan Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2005-2016**, Yuniadi Mayowan S.Sos.MAB.

Indonesia merupakan negara yang terkategori ke dalam negara berkembang, karena Indonesia tengah melakukan pembangunan di setiap aspek terutama di bidang infrastruktur. Untuk melaksanakan proses pembangunan pemerintah memerlukan sejumlah dana, dana tersebut diantaranya bersumber dari APBN yang merupakan sumber utama pembiayaan rutin pemerintah. Dalam APBN Pajak menduduki urutan pertama dan menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 1.750,9 triliun rupiah pada tahun 2018. Dari pendapatan tersebut Pajak Penghasilanlah yang menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah Rp1.498,9 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa proses realisasi penerimaan PPh sangatlah penting untuk dilakukan karena PPh memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur APBN. Salah satu yang mempengaruhi penerimaan PPh adalah faktor ekonomi makro seperti pendapatan nasional perkapita, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data tahunan mulai tahun 2005 sampai 2016 dengan sampel sebesar 12 buah data runtut waktu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dokumentasi pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Badan Pusat Statistika (BPS), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel penerimaan Pajak Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional perkapita, sedangkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan Pajak Penghasilan bersifat tidak signifikan.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kontribusi Penelitian.....	19
E. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Pajak	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	20
3. Penggolongan Pajak	20
4. Teori Pendukung Pemungutan Pajak.....	24
5. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	26
6. Sistem pemungutan pajak.....	28
7. Tarif Pajak	30
C. Pajak Penghasilan	31
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	31
2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP).....	32
D. Pendapatan Perkapita	41
E. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Indonesia (SBI)	43
1. Pengertian Suku Bunga	43
2. Macam-macam Suku Bunga.....	44
3. Fungsi Suku Bunga	45

4. Pengertian Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia	46
5. Tujuan Sertifikat Bank Indonesia	47
6. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia	48
7. Karakteristik SBI	49
F. Hubungan antar Variabel	50
G. Model Konsep dan Variabel	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Lokasi penelitian	59
C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	59
D. Populasi dan Sampel	63
E. Jenis dan Sumber Data	63
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	69
B. Penerimaan Pajak Penghasilan	69
C. Uji Statistik dan Pembahasan	74
D. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92
Daftar Riwayat Hidup	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Nasional dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2005-2016 (dalam miliar rupiah)	1
Tabel 2. Pendapatan Nasional Perkapita Tahun 2005-2016 (dalam rupiah)	3
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pajak yang berakhir pada 31 desember 2016 (dalam triliun rupiah).....	8
Tabel 5 Hasil Penelitian Terdahulu	17
Tabel 6. Tarif Progresif Pajak Penghasilan	30
Tabel 7. Tarif Progresif Pajak Penghasilan	33
Tabel 8. Tarif Progresif Pajak Penghasilan	40
Tabel 9. Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal	21
Tabel 10. Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis	62
Tabel 12. Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam Miliar Rupiah)	70
Tabel 13. Pendapatan Nasional Perkapita (PDB Perkapita dalam Miliar Rupiah)....	72
Tabel 14. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (dalam Persen).....	73
Tabel 15. Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumus perhitungan pendapatan perkapit.....	6
Gambar 2. Model Konsep (2018).....	56
Gambar 3. Model Hipotesis (2018).....	56
Gambar 4. Korelasi pendapatan nasional perkapita dengan Pajak Penghasilan.....	75
Gambar 5. Korelasi suku bunga SBI dengan Pajak Penghasilan.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendapatan Nasional Perkapita (PDB Perkapita dalam Rupiah).....	92
Lampiran 2. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (dalam Persen).....	93
Lampiran 3. Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam Miliar).....	94
Lampiran 4. Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis	95
Lampiran 5. Korelasi Pendapatan Nasional Perkapita dengan Pajak Penghasilan	96
Lampiran 6. Korelasi BI rate dengan Pajak Penghasilan.....	96
Lampiran 7. Riwayat Hidup.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang harus terus melakukan inovasi dalam pembangunannya, yaitu adalah perbaikan sarana-sarana umum seperti jalan raya, jembatan dan lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan bahwa perekonomian Indonesia mengalami perkembangan. Berikut adalah kondisi perekonomian Indonesia berdasarkan pendapatan nasional selama tiga belas tahun ke belakang :

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Nasional dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2005-2016 (dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Nasional Perkapita (dalam miliar rupiah)	Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam miliar rupiah)
1	2005	11.010.476.78	180.253.000.00
2	2006	13.008.853.48	213.698.000.00
3	2007	15.223.494.38	251.748.000.00
4	2008	19.087.875.69	327.498.000.00
5	2009	20.935.863.42	317.615.000.00
6	2010	23.974.407.31	357.046.000.00
7	2011	27.487.046.94	431.122.000.00
8	2012	30.674.674.07	465.070.000.00
9	2013	32.463.736.28	506.443.000.00
10	2014	41.900.000.00	546.181.000.00
11	2015	45.200.000.00	602.308.000.00
12	2016	48.000.000.00	666.212.000.00

Sumber : *bps.go.id* (2018)

Berdasarkan pendapatan nasional pada data tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa perekonomian Indonesia begitu stabil. Bila dibandingkan dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Pada sisi lain pendapatan nasional dipengaruhi oleh perekonomian makro, dan di dalam perekonomian makro terdapat beberapa variabel yang sangat mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah pendapatan perkapita dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan nasional inilah yang digunakan untuk mendanai pembangunan di Indonesia.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan, menaikkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dana dan untuk pembiayaan pembangunan dan keperluan rutin diatur oleh pemerintah lewat keuangan negara (Anonim dalam Prastyo, 2010:1).

Pembiayaan pembangunan di Indonesia sangatlah bergantung terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pemasukan dana kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai anggaran belanja negara (APBN) (Syahab dalam Sarizaen, 2012:1). Namun meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tapi penerimaan pajak di

Indonesia tetap masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk lebih mudah dalam upaya tersebut perlu diidentifikasi faktor apa saja yang dapat meningkatkan penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akan lebih terfokus dalam peningkatan tiap-tiap faktor tersebut. Sehubungan dengan hal ini beberapa orang telah melakukan penelitian, Prastyo (2011) mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak (WP), pendapatan perkapita dan jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan pajak secara positif. Sedangkan Purnamasari (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Pendapatan Nasional Perkapita Tahun 2005-2016 (dalam rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Nasional Perkapita (dalam rupiah)
1	2005	11.010.476.78
2	2006	13.008.853.48
3	2007	15.223.494.38
4	2008	19.087.875.69
5	2009	20.935.863.42
6	2010	23.974.407.31
7	2011	27.487.046.94
8	2012	30.674.674.07
9	2013	32.463.736.28
10	2014	41.900.000.00
11	2015	45.200.000.00
12	2016	48.000.000.00

Sumber : *bps.go.id* (2018)

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pendapatan perkapita masyarakat Indonesia naik dari Rp 41,9 juta per tahun perkapita pada 2014 menjadi Rp 45,20 juta per tahun perkapita pada 2015. Pendapatan

perkapita pada 2015 tersebut juga meningkat bila dibandingkan 2013 yang sebesar Rp 32,46 juta per tahun perkapita. Meskipun pendapatan perkapita menunjukkan tren kenaikan, Direktur *Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance* (Indef) Enny Sri Hartati menilai, kesejahteraan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin. Hal tersebut terlihat dari indeks gini rasio yang tidak menunjukkan perbaikan bahkan sejak 2011.

“Kenaikan PDB perkapita itu karena 20 persen masyarakat teratas tumbuhnya jauh lebih cepat. Masyarakat terbawah tidak tumbuh, atau bahkan menurun. Cara mengukur pendapatan perkapita adalah total pendapatan dibagi penduduk. Kalau dilihat *size* memang meningkat, tapi masih ada kesenjangan sehingga yang menikmati hanya 20 persen teratas“, Enny (2017). Hal senada disampaikan oleh *Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), Yustinus Prastowo. Melihat peningkatan pendapatan di satu sisi dan melebarnya ketimpangan di sisi lain, pemerintah harus segera merumuskan kebijakan fiskal yang pro-pemerataan. Di Indonesia problem utamanya adalah. Pertama, orang kaya belum membayar pajak. Kedua, redistribusi tidak berjalan baik.

Tingkat kemakmuran suatu negara tidak hanya dilihat dari besar kecilnya GNP atau GDP, karena GNP atau GDP tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GNP maupun GDP tersebut. GNP tinggi yang dimiliki suatu negara bukan suatu ukuran bahwa negara tersebut telah makmur. Karena bisa jadi jumlah penduduk yang harus dihidupi dari GNP tersebut juga sangat tinggi jumlahnya.

Dengan demikian, ukuran yang lebih tepat untuk mengukur kemakmuran suatu negara adalah dengan menghitung pendapatan perkapitanya.

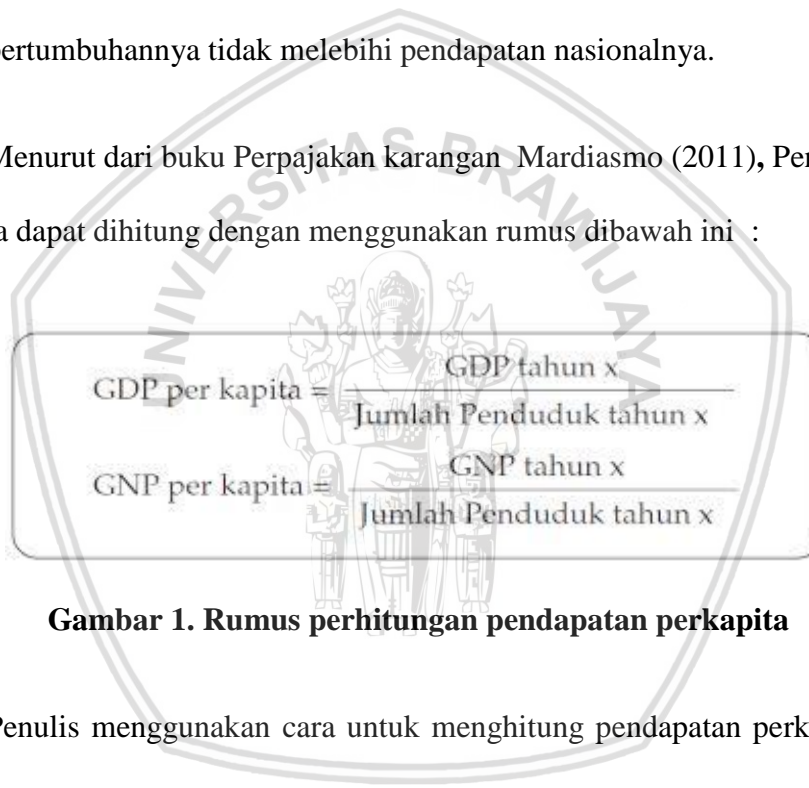
Perbedaan antara GNP dan GDP :

1. *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pengertian ini sering disebut konsep kewarganegaraan.
2. *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan. Pengertian ini sering disebut sebagai konsep kewilayahan.

Pendapatan Perkapita ialah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita ini merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Negara yang memiliki nilai pendapatan nasional yang tinggi belum tentu lebih makmur bila dibandingkan dengan negara yang berpendapatan rendah dikarenakan jumlah penduduk pun menentukan tingkat kemakmuran dari negara tersebut. Maka dari itu, meski suatu negara memiliki pendapatan nasional yang tinggi namun jumlah penduduknya sangat banyak maka belum tentu negara tersebut tergolong sebagai kelompok negara makmur.

Dalam rangka mencapai kemakmuran suatu negara, usaha peningkatan pendapatan nasional harus disertai dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali, maka peningkatan pendapatan perkapita juga tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan bisa terjadi pendapatan perkapitanya menurun. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tingkat pertumbuhannya tidak melebihi pendapatan nasionalnya.

Menurut dari buku Perpajakan karangan Mardiasmo (2011), Pendapat perkapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :


$$\begin{aligned}\text{GDP per kapita} &= \frac{\text{GDP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x} \\ \text{GNP per kapita} &= \frac{\text{GNP tahun } x}{\text{Jumlah Penduduk tahun } x}\end{aligned}$$

Gambar 1. Rumus perhitungan pendapatan perkapita

Penulis menggunakan cara untuk menghitung pendapatan perkapita yaitu dengan berdasarkan harga yang sedang berlaku. Jika kita menghitung pendapatan perkapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan perkapita nominal. Pendapatan perkapita nominal adalah pendapatan perkapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi. Kegunaan dari penghitungan pendapatan perkapita adalah sebagai berikut : sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun, sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, sebagai perbandingan tingkat

standar hidup masing masing negara dari tahun ke tahun, dan sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Adanya hasil pendapatan perkapita akan menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ekonomi.

Baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari berbagai segi. Hendaknya kita ketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional perkapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Keempat tujuan umum pembangunan ini tidak selalu sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Sebagai contoh untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali terjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang/tidak merata.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari kenaikan keadaan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan gambaran dari keadaan suatu masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi negara tersebut baik, sedangkan apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara rendah maka itu menggambarkan keadaan ekonomi negara tersebut buruk. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnamasari (2011) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Tujuan tersebut dapat terealisasi dengan baik, jika terdapat perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan bersama (Waluyo, 2011).

Pajak merupakan salah satu dari sumber pendapatan yang diperoleh Indonesia dari dalam maupun luar negeri, dan pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang diperoleh bagi Indonesia. Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh Prastowo, Indonesia problem utamanya adalah. orang kaya belum membayar pajak dan redistribusi tidak berjalan baik. Dari sini bisa kita lihat bagaimana ke eratan antara pendapatan perkapita dengan pajak. Berikut penerimaan negara dari sektor pajak maupun dari sektor non pajak :

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pajak yang berakhir pada 31 desember 2016 (dalam triliun rupiah)

No	Uraian	Realisasi Bruto (dalam triliun rupiah)
1	Pendapatan Pajak	1.472,7
2	Non-Pajak	260,2
3	Jumlah	1.732,9

Sumber : *bps.go.id* (2018)

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat

umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya jika anda membayar pajak jalan raya maka Anda akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerah Anda.

Berdasarkan dari *Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983* yang kemudian disempurnakan dengan *UU No. 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya.

Salah satu masalah besar yang sering menjerat Indonesia. Pajak yang merupakan pungutan yang biasanya harus dibayarkan kepada pemerintah demi memajukan negaranya. Dengan kata lain membayar pajak adalah salah satu kewajiban anda sebagai warga Negara yang baik. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa seorang Negara bisa maju ketika rakyatnya sudah mau

membayar pajak dengan kesadaran mereka sendiri. Saat mereka mau membayar pajak tempat waktu dan sesuai dengan jumlah menurut perundang-undangan yang berlaku, keadaan suatu Negara akan bisa menjadi baik dan maju.

Dampak langsung dari pungutan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel maka konsumsi relatif menjadi turun pula. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Demikian pula jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional. Tentu saja hal ini dengan asumsi jika komponen lain yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional tidak berubah. Identitas perhitungan pendapatan nasional yang paling umum dapat dilakukan seperti berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Waluyo (2011)

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pembelian oleh pemerintah

X – M = Total bersih ekspor atau ekspor netto

Y = GDP

Disisi lain, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Peningkatan pungutan pajak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai konsumsi, investasi dan nota ekspor tetap. Pajak akan menurunkan konsumsi, dilain pihak pajak menaikkan pendapatan pemerintah. Karena nilai uang yang dikeluarkan dari rumah tangga maupun masyarakat untuk pajak adalah sama dengan pendapatan pemerintah dari pajak, maka nilai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak paling besar sama atau lebih kecil dari nilai pajak itu sendiri.

Melihat hal diatas bisa dilihat bahwa potensi penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan, salah satunya sangat tergantung pada tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang nilainya ditentukan oleh kondisi perekonomian makro. Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan. Ada beberapa indikator kondisi perekonomian makro yang selalu diperhitungkan dan selalu menjadi asumsi dasar pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan APBN setiap tahun salah satunya yaitu: Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Laju Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Safari : 2011).

Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk kabupaten/kota dengan rincian 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk

seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun masa pajak (Resmi, 2005:74). Hal tersebut dibagi lagi jenis-jenis pajaknya menurut pasal-pasal yang telah diatur dalam undang-undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan menurut subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Penghasilan orang pribadi dan Pajak Penghasilan badan. Disini peneliti akan menghubungkan variabel variabel tersebut pada pajak penghasilan orang pribadi (OP). Pajak Penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi berdasarkan penghasilan yang didapatnya selama setahun dia bekerja, penghasilan tersebut merupakan penghasilan bersih yang sudah dikurangi fasilitas dan kewajiban. Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menekan kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Salah satunya dengan menerapkan pajak progresif alias bertingkat atas pendapatan masyarakat.

Jadi, semakin tinggi pendapatan seseorang maka tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Dengan kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan tinggi semestinya berkontribusi lebih kepada penerimaan negara yang akan dimanfaatkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Meski begitu, Sri Mulyani memahami, kebijakan itu tak lantas menekan kemiskinan dan ketimpangan. Pangkal soalnya, orang dengan penghasilan tinggi mudah menghindari pajak dengan memindahkan hartanya ke

negara suaka pajak (*tax haven*). Di samping itu, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya progresif. Menurut Edimon, sistem perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Jika mengacu pada data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bentuk penerimaan pajak di negara-negara maju lebih didominasi oleh pajak penghasilan (PPh) individu (PPh 21).

Berikut adalah Undang-undang yang mengatur besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 yang masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber : *Undang-Undang Perpajakan (2009)*

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam Internasional Steve Price Thomas menyebutkan ada empat persoalan yang menyebabkan lebarnya jurang ketimpangan di negara-negara Asia. Persoalan *pertama* terkait belum meratanya akses untuk mendapatkan modal dan layanan masyarakat. *Kedua*, akses sumber daya produktif yang tidak merata. *Ketiga*, gaji atau kompensasi yang rendah bagi tenaga kerja imigran. Terakhir, sistem perpajakan yang buruk. Keempat persoalan tersebut harus diatasi agar bisa mengurangi ketimpangan.

Masalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia pun menjadi kendala, seperti yang terjadisaat 31 Agustus 2013 lalu. Resiko yang terdapat dalam permasalahan tersebut adalah menghambat pertumbuhan kredit dan hal ini sangat mengganggu bisnis para pengusaha khususnya dalam hal jual beli dikarenakan daya beli masyarakat rendah, sehingga keuntungan menjadi kecil, pajak yang dikenakan pun menjadi kecil. Jika suku bunga tinggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan dananya di bank karena ia dapat mengharapkan pengembalian yang menguntungkan sehingga permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena masyarakat sibuk mengalokasikannya ke dalam bentuk portofolio perbankan (deposito dan tabungan) (Prasetiantono, 2000).

Suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya (Mishkin, 2008). Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga yang tinggi di satu sisi, akan meningkatkan

hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat, di lain pihak minat masyarakat untuk melakukan investasi akan menurun. Sebaliknya tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong minat masyarakat untuk melakukan investasi, membuka usaha atau kegiatan sejenisnya yang akan dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Penghasilan.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem bunga diskonto. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan yang beredar. Tingkat suku bunga SBI yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme "BI rate". BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Pinilih, 2016).

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan

mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan. *BI rate* digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar *BI rate*. Selanjutnya suku bunga SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank dan suku bunga jangka yang lebih panjang. Perubahan *BI rate* (SBI tenor 1 bulan) ditetapkan secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Berikut rumus perhitungannya, Waluyo (2011) :

$$\text{Nilai tunai} = \frac{\text{Nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{Jangka waktu})}$$

Tingkat suku bunga juga berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat (Sukirno, 2006: 25). Jika suku bunga rendah, maka jumlah uang yang beredar akan tinggi dan investasi akan bertambah. Hal ini berakibat pada

peningkatan pengeluaran (*output*) secara agregat sehingga kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran dapat ditekan. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar terlalu tinggi (*inflasi*) maka suku bunga dapat ditingkatkan untuk menurunkan investasi dan pengeluaran agregat sehingga uang yang beredar dapat dikendalikan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi negara, yang dapat mendorong penerimaan pajak agar optimal (Ferdiawan, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengetahui bahwa faktor-faktor yang dipakai sebagai variabel penelitian saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut merupakan data yang berfluktuatif, maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti apakah dengan kefluktuatifan data tersebut penerimaan pajak dalam hal ini Pajak Penghasilan dapat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Bisa kita lihat dalam kenyataannya terdapat kesenjangan pendapatan perkapita antara si miskin dan si kaya, dan itu berdampak pada pembayaran pajak Orang Pribadi nya (OP). Dan akan berdampak pada kesejahteraan tiap rumah tangga masyarakat Indonesia. Pada hal lainnya juga tingkat suku bunga yang memicu investor untuk melakukan investasi ke bank dengan mengharapkan keuntungan dari pendapatan bunga. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perekonomian suatu negara merupakan indikator yang dipengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional bisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan pada penelitian ini peneliti memilih Pajak Penghasilan sebagai variabel yang dijadikan pembanding atas kedua variabel yang sudah dijabarkan sebelumnya. Untuk membuktikan adanya korelasi atau hubungan Pajak penghasilan dengan 2

variabel tersebut. Tingkat pendapatan perkapita dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia merupakan variabel ekonomi makro yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Negara dapat memperoleh penerimaan pajak yang optimal apabila perekonomian negara tersebut berada dalam kondisi yang stabil. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis menarik sebuah judul untuk penelitian yaitu ***“Hubungan Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2005 -2016”***.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pendapatan perkapita berhubungan terhadap realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2005-2016 ?
2. Apakah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berhubungan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2005-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan perkapita berhubungan terhadap realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2005-2016.
2. Untuk mengetahui apakah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berhubungan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2005-2016.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, agar pemerintah berusaha selalu menjaga kestabilan faktor-faktor ekonomi makro guna mencapai target yang telah ditentukan. Sebagai saran untuk terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan.

2. Bagi Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan ide dan pemikiran sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan penelitian yang sudah ada. Melalui penelitian ini juga bisa diharapkan bisa memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan disiplin ilmu perpajakan. Terlebih lagi bisa memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan perkapita dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dalam ilmu teori serta pengalaman terkait topik penelitian yang mengangkat hubungan antara faktor-faktor ekonomi makro dan hubungannya dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti yang akan meneliti topik yang sama dengan penulis.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan yang dijadikan pemikiran dasar dan kenapa menjadi sebuah masalah yang *urgent* untuk diteliti. Membahas fakta yang terjadi seputar penelitian. Terdapat rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang melandasi topik penelitian, mengangkat dasar teori, pendapat serta penelitian terdahulu. Selain itu juga terdapat model penelitian yang menginformasikan keterkaitan antar variabel dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, alasan mengapa menggunakan jenis penelitian tersebut. Menerangkan dimana lokasi penelitian diadakan serta alasan menggunakan lokasi tersebut. Terdapat definisi variabel yang digunakan, serta menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Mengungkapkan bagaimana cara pengambilan sampel dan teknik serta metode pengumpulan data. Berisi instrumen

pengambilan data penelitian. Menerangkan pula teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah, maka di dalam bab IV akan membahas 2 permasalahan. Pertama, bagaimana hubungan pendapatan nasional perkapita terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Indonesia tahun 2005-2016. Kedua, bagaimana hubungan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Indonesia tahun 2005-2016.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 5 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Prastyo Bangun Nuswantara (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Surabaya	Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan Pajak Penghasilan.	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Wajib Pajak (X1), Upah Minimum Regional (X2), pendapatan perkapita (X3), dan jumlah penduduk (X4), berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y).
2	Rakiman (2011)	Pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2002-2010.	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan, sedangkan variabel bebasnya adalah pendapatan perkapita dan jumlah Wajib Pajak.	Berdasarkan penelitian ini dibuktikan bahwa pendapatan perkapita dan jumlah wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

3	Rahmanta (2012)	Pengaruh Produk Domestik Bruto dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan pajak di indonesia.	Produk Domestik Bruto dan Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia menjadi variabel bebas dalam penelitian ini. Sedangkan penerimaan Pajak menjadi variabel terikatnya.	Kesimpulan penelitian ini produk domestik bruto dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak secara simultan. Dan berdasarkan hasil uji parsial diperoleh bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
---	------------------------	---	---	---

Sumber : Data Diolah (2018)

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2012:1) yaitu, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan definisi pajak menurut Adriani mengemukakan, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas pengertian pajak yaitu iuran wajib yang pembayaran pajaknya harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi, tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal balik dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan), pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang utama bagi negara Indonesia, dan juga pajak merupakan sumber dana untuk melaksanakan pembangunan dan kelangsungan hidup negara Indonesia, maka dari itu pajak sangat penting bagi negara kita Indonesia. Fungsi pajak pun berbeda-beda, menurut Mardiasmo (2012:1) ada dua fungsi pajak, yaitu.

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Penggolongan Pajak

Menurut Mardiasmo (2012:1) pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu.

a. Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan kondisi serta keadaan wajib pajak untuk menentukan berapa jumlah pajak yang harus dipungut dengan memperhatikan materi yang dimilikinya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, baru kemudian dicari subjeknya apakah orang pribadi atau badan. Dengan kata lain pajak objektif dikenakan atas dasar keadaan dari objek pajak tersebut.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut wewenang pemungut, dibagi menjadi dua yaitu.

a. Pajak Pusat / Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yang dilaksanakan oleh Departemen Jenderal Pajak (DJP)

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM),

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten atau Kota. Termasuk Pajak Daerah adalah :

1). Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2). Pajak Kabupaten dan Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Berdasarkan pemaparan diatas pajak dibagi menjadi tiga aspek yaitu golongan, sifat, dan juga wewenang. Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu langsung yang bermakna bahwa pajak dikenakan langsung kepada wajib pajak tanpa melalui pihak ketiga dan tidak langsung yang bermakna bahwa pajak dikenakan tidak langsung dengan melalui pihak ketiga atau pembebanan pajaknya bisa dialihkan. Pajak menurut sifat yang dibagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Subjektif berarti pajak memandang dari wajib pajak sedangkan objektif berarti pengenaan pajaknya berdasarkan dengan keadaan yang benar-benar terjadi kepada wajib pajak. Aspek ketiga adalah pajak menurut wewenangnya juga dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat yang berarti bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana, sedangkan satu dari jenis pajak menurut wewenang adalah pajak daerah yang berarti bahwa pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah selaku pelaksana. Pemaparan diatas menyebutkan bahwa PBB P2 dan BPHTB masih masuk dalam jenis pajak pusat, namun pada tahun 2012 untuk PBB P2 dan BPHTB telah dimasukkan menjadi pajak daerah.

4. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Teori Pajak sangat bermacam-macam menurut para ahli, namun teori para ahli terkadang berbeda dari satu teori ke teori, tetapi masih dalam koridor yang sama. Berikut adalah teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Mardiasmo, 2011:3-4) :

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Seperti halnya asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh setiap individu.

b. Teori Kepentingan

Teori ini menyatakan bahwa pembagian beban pajak yang harus ditanggung adalah berdasarkan kepentingan individu masing-masing. Semakin besar kepentingan yang ditanggung, maka semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadap individu tersebut dan sebaliknya apabila semakin kecil kepentingan yang ditanggung maka semakin kecil pula pajak yang ditanggung individu tersebut.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa besaran pajak yang dibayarkan harus benar-benar sama beratnya, yang berarti besaran pajak yang

dikenakan didasarkan kepada daya pikul masing-masing setiap individu. Pengukuran asas daya pikul tersebut ada dua pendekatan, yaitu :

1) Unsur Objektif

Unsur ini melihat besaran pajak yang dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan maupun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

2) Unsur Subjektif

Unsur ini melihat besaran pajak yang dikenakan berdasarkan besarnya materiil yang harus dipenuhi, maksudnya adalah jumlah keluarga yang ditanggung oleh seseorang, seperti menikah dengan memiliki dua anak.

d. Teori Bakti

Teori ini menjelaskan bahwa negara sebagai pelindung semua masyarakat yang berada didalamnya, meyakinkan kepada masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban mutlak. Kewajiban membayar pajak merupakan sebuah keharusan untuk membuktikan tanda bakti masyarakat terhadap negara tercinta.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini memiliki dasar keadilan pada akibat pemungutan pajak. Keadilan tersebut dimaksudkan untuk menarik daya beli rumah tangga masyarakat yang kemudian disalurkan untuk rumah tangga negara, kemudian pemerintah menyalurkan hal tersebut untuk

pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah demi terciptanya kepentingan seluruh masyarakat.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak merupakan proses yang digunakan oleh pemungut pajak untuk memungut pajak yang terutang dari wajib pajak yang bersangkutan. Proses tersebut memiliki tiga kategori menurut (Resmi, 2008:9-12), dan kategori tersebut adalah sebagai berikut :

a. Stelsel Pajak

Pemungutan stelsel pajak dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

1) Stelsel Nyata (Riil)

Pemungutan jenis ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang benar-benar terjadi (penghasilan). Pemungutan pajak pada stelsel ini baru bisa dilaksanakan ketika akhir periode, yaitu ketika penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Stelsel ini memiliki kekurangan dan kelebihan, kekurangannya adalah stelsel ini baru dikenakan pada akhir periode, sedangkan kelebihan adalah pengenaan besaran pajak yang terutang lebih akurat dan realistis karena berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima.

2) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pemungutan jenis ini menyatakan bahwa pemungutan yang terjadi didasarkan pada suatu anggapan yang sudah diatur oleh Undang-

Undang.Stelsel fiktif dipungut berdasarkan suatu anggapan penghasilan tahun lalu sama dengan penghasilan masa pajak tahun sekarang, sehingga besaran pajak pada tahun berjalan dapat diketahui dan ditetapkan diawal tahun masa pajak yang bersangkutan. Pemungutan jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah pajak yang terutang dapat dibayarkan pada saat tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kekurangannya adalah perhitungan pajaknya tidak realistis dan akurat.

3) Stelsel Campuran

Pemungutan jenis ini dihasilkan oleh kombinasi dari pemungutan jenis stelsel riil dan stelsel anggapan. Awal tahun wajib pajak akan menggunakan stelsel anggapan untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang terutang, sedangkan pada akhir tahun akan diadakan penyesuaian berdasarkan keadaan yang benar-benar terjadi pada pendapatan yang telah dihasilkan. Wajib pajak harus menambah pajak yang terutang apabila pajak yang menurut anggapan lebih besar maka kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan (Mardiasmo, 2012:1)

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak memungut dan mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara tersebut, baik penghasilan yang

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama wajib pajak yang bersangkutan masih tinggal di suatu wilayah sebuah negara maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang didaptkannya, walaupun penghasilan tersebut berasal dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak memungut dan mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat dari negara tersebut. Penghasilan yang didapat dari negara tersebut harus dikenakan dan dipungut pajak tanpa memandang apakah itu warga negara atau bukan. Setiap orang yang mendapat penghasilan dari negara yang bersangkutan maka orang tersebut wajib membayar pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan suatu negara, semisal pajak bangsa asing pada suatu negara dikenakan atas orang asing yang bukan menjadi warga negara yang bersangkutan.

6. Sistem pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2012:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajakyaitu :

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Ciri-cirinya yaitu.

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak ada bermacam-macam, menurut (Mardiasmo, 2008:9-10) dibagi menjadi empat sebagai berikut :

a. Tarif Proporsional

Tarif yang bersifat tetap yang terwujud dalam bentuk prosentase.

Semisal tarif PPN yang tetap di angka 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah berapapun barang yang dikenai pajak, besaran pajaknya pun tetap sama dan tidak berubah. Semisal bea materai, berapapun barang yang dikenai pajak, tarifnya tetap Rp3000,00.

c. Tarif progresif

Prosentase yang digunakan semakin besar apabila penghasilan yang didapatkan menjadi semakin besar. Semisal tarif yang dikenakan pada Pajak Penghasilan pasal 17 Undang-Undang Perpajakan.

Tabel 6. Tarif Progresif Pajak Penghasilan

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
2	Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
3	Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
4	Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Sumber : *Undang-Undang Perpajakan (2009)*

d. Tarif Degresif

Tarif yang berbanding terbalik dengan tarif progresif, bila progresif penghasilan semakin besar dan tarifnya juga akan semakin besar, maka tarif progresif kebalikannya. Tarif degresif merupakan prosentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila penghasilan wajib pajak semakin besar.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008 Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP)

a. Pajak PPh Orang Pribadi (OP)

1. Pengertian WPOP

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berikut adalah subjek pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

3. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tarif dikenakan kepada orang pribadi dan badan, tarif tersebut adalah sebagai berikut :

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut

Tabel 7. Tarif Progresif Pajak Penghasilan

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
2	Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
3	Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
4	Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Sumber : *Undang-Undang Perpajakan (2009)*

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

4. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

- 1) Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 2) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
- 3) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

5. PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

6. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008.

7. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah: Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yg terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun Takwim lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada direktur jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

8. Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah :

- 1) Setiap Pemotong Pajak Wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 2) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 3) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim.

- 4) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
 - 5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pension bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir.
9. Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh pasal 21)
- Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :
- 1) Pegawai
 - 2) Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
 - 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain.
 - 4) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - 5) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film dan seniman lainnya.
 - 6) Olahragawan
 - 7) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.

- 8) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - 9) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya.
 - 10) Agen iklan
 - 11) Pengawas atau pengelola proyek
 - 12) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - 13) Petugas penjaja barang dagangan
 - 14) Petugas dinas luar asuransi
 - 15) Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
10. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (objek PPh Pasal 21)
- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
 - 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

11. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorium, komisi, dan fee.

Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

12. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah (termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 5) Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi dan pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

13. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara umum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang pada PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak adalah :

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

14. Tarif PPh Pasal 21

Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 8. Tarif Progresif Pajak Penghasilan

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp 0 - sampai dengan Rp50.000.000,00	5 %
2	Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,	15 %
3	Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
4	Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Sumber : *Undang-Undang Perpajakan (2009)*

15. Tarif Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2 bahwa: Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri dan pensiunannya.

- 1) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tmatama dan Bintara, dan pensiunannya.
- 2) Tarif 5% dari jumlah bruto onorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat prwira Pertaa dan pensiunannya.
- 3) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.

- 4) Tarif khusus berikut diterpkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
- 5) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000
- 6) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000.
- 7) Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 smpai dengan Rp 500.000.000
- 8) Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp 500.000.000.

D. Pendapatan Perkapita

Pendapatan PerKapita (*PerCapita Income* / PCI) adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu, Waluyo (2011). Penghitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam sebuah negara. Pendapatan Perkapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan negara, standar pertumbuhan kemakmuran negara, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antarnegara.

Indikator kesejahteraan negara. Angka pendapatan perkapita merupakan ukuran yang paling dapat di andalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup jumlah penduduk sehingga secara langsung dapat

menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan nasional lainnya, seperti PND, PDB dan sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.

Standar pertumbuhan kemakmuran negara. Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, untuk memastikan apakah kesejahteraan masyarakat memang benar-benar meningkat, kita harus memperhitungkan pendapatan per kapita secara *riil*, yaitu peningkatan pendapatan per kapita dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi karena pemerintah dapat memantau pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mempertahankan tingkat inflasi yang paling minimum agar tingkat kesejahteraan masyarakat stabil.

Pembandingan tingkat kemakmuran antarnegara. Selain sebagai pembandingan tingkat kemakmuran suatu negara dari tahun ke tahun, pendapatan per kapita juga umum digunakan sebagai pembandingan tingkat kemakmuran antara negara yang satu dengan lainnya. Dengan menetapkan standar pendapatan perkapita, maka negara-negara di dunia dapat

dikelompokkan ke dalam negara berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi.

E. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Indonesia (SBI)

1. Pengertian Suku Bunga

Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan, Mardiasmo (2011). Bunga dari sisi penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana akan menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran yang tinggi. Sedangkan bunga dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman atau jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. Bunga merupakan harga yang dibayar atas modal.

Seperti yang dikemukakan oleh Wiston dan Brigham (1993:80) bahwa “Suku bunga adalah harga yang dibayarkan atas modal serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari suatu ekuitas”.

Dari pendapat di atas suku bunga merupakan harga yang dibayarkan dari seseorang kepada orang yang menanamkan uangnya sebagai modal suatu usaha. Pendapat lainnya dari Martorejo (1987:312) bahwa “suku bunga sebagai harga yang dibayar atas penggunaan uang atau dana yang dipinjamkan yang dinyatakan dalam persentase dari jumlah yang dipinjamkan”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sukirno (1991:377) bahwa “Suku bunga adalah pembayaran keatas modal yang dipinjamkan dari pihak lain, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase dari modal yang dipinjamkan”.

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suku bunga merupakan balas jasa dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan yang biasanya dalam bentuk persentase.

2. Macam-macam Suku Bunga

Menurut Kasmir (2000:55) yang menyatakan “Bahwa dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 (dua) macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman”.

1. Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai perangsang atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabah. Sebagai contoh: jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga harus yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank atas pinjaman modal yang dinikmati oleh nasabah tersebut. Sebagai contoh bunga kredit.

Suku bunga merupakan daya tarik bagi nasabah, sebagai imbalan bagi masyarakat yang meminjam uang ke bank, diharapkan calon debitur

akan tertarik untuk meminjam uang ke bank tersebut, walaupun bunga kredit yang dibebankan kepada calon debitur harus dikembalikan pada setiap bulan sesuai dengan persentase yang dibebankan.

Besarnya suku bunga pinjaman berbeda-beda sesuai dengan penanggung pinjaman, misalnya :

1) Pinjaman dagang

Kecenderungan seseorang meminjam uang kepada bank untuk dijadikan sebagai modal dalam aktivitas perdagangan yang mereka lakukan.

2) Pinjaman Investasi

Kecenderungan seseorang untuk meminjam uang kepada bank dengan tujuan untuk melakukan investasi yang berupa barang modal yang digunakan untuk kegiatan produksi yang memiliki prospek lebih baik daripada investasi sebelumnya. (Nopirin, 1993:74)

3. Fungsi Suku Bunga

Para ahli menyimpulkan bahwa fungsi suku bunga sangat penting untuk para investasi maupun orang-orang biasa secara umum, menurut Sunariyah (2006:80) fungsi suku bunga ada empat kategori, yaitu :

- a. Sebagai daya tarik penabung, baik orang pribadi maupun yang berbentuk lembaga untuk menginvestasikan uangnya ke bank-bank, baik swasta maupun bank-bank milik negara.

- b. Tingkat suku bunga bisa dijadikan alat moneter sebagai pengendali tingkat penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian sebuah negara/
- c. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat control pemerintah terhadap dana langsung atau sektor-sektor ekonomi.
- d. Tingkat suku bunga dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk memanipulasi tingkat suku bunga dalam rangka meningkatkan hasil produksi, dan pada akhirnya suku bunga dapat dijadikan alat sebagai pengontrol laju inflasi yang terjadi.

4. Pengertian Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat merupakan suatu surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pendapat tersebut diperkuat oleh S.K Direksi BI No. 31/67/Kep/DIR tertanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi rupiah yakni “Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk atas rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto”.

Menurut Manurung, (2003:19) “Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab atas kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan menjaga kestabilan terhadap jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengatasi masalah tersebut, dalam paradigma yang telah dianut, bahwa sesungguhnya apabila jumlah uang primer (uang kartal + uang giral yang dikeluarkan Bank Indonesia) yang beredar di dalam masyarakat sudah melampaui ambang batas normal akan menyebabkan kestabilan terhadap jumlah uang yang beredar akan terganggu, dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang bertanggung jawab penuh atas hal tersebut akan menerbitkan dan menjual Sertifikat Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang primer yang beredar di dalam masyarakat.

5. Tujuan Sertifikat Bank Indonesia

Bank Indonesia menjual SBI dengan tujuan antara lain untuk memperkecil jumlah uang beredar dan sekaligus menjaga deflasi serta membuat inflasi tidak terjadi secara terus-menerus. Sesuai dengan konsep tersebut maka SBI mempunyai jangka waktu maksimum dan saat ini yang diperdagangkan adalah SBI berjangka waktu satu bulan dan tiga bulan. Berdasarkan jangka waktu dari SBI ini maka sering para investor ataupun pemain dalam pasar uang mengklarifikasikan SBI sebagai salah satu instrumen pasar uang dan dianggap beresiko rendah.

Tujuan penerbitan SBI sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. Dan sebaliknya, bila menambah uang beredar maka Bank Indonesia membeli surat-surat berharga di pasar uang. Melalui penggunaan SBI, Bank Indonesia (BI) dapat secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan *stop out rate* (SOR). SOR merupakan tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta pada lelang harian maupun mingguan. Selanjutnya *stop out rate* tersebut digunakan sebagai indikator bagi tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya.

6. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

Pada setiap penjualan sertifikat Bank Indonesia ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak tahun 2005 Bank Indonesia menggunakan acuan suku bunga atau yang lebih dikenal dengan *BI rate*. *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dengan digunakannya *BI rate*, Bank Indonesia akan mengumumkan target suku bunga sertifikat Bank Indonesia yang diinginkan untuk pelelangan pada masa periode tertentu, kemudian *BI rate*

akan menjadi sebuah acuan bagi pelaku pasar dalam mengikuti proses pelelangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

7. Karakteristik SBI

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pasal 3 ayat 1 (satu), Sertifikat Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta)
- b. Berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- c. Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto.
- d. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). Artinya Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI hanya berupa pencatatan elektronik.
- e. Dapat dipindah tangankan (*negotiable*).

SBI ada yang mempunyai jangka waktu: 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai. Sedangkan penghitungan diskonto dalam perdagangan SBI dengan Bank Indonesia dilakukan atas dasar rumus diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut, Waluyo (2011):

$$\text{Nilai tunai} = \frac{\text{Nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{Jangka waktu})}$$

Keterangan :

- Nilai Tunai : Nilai yang akan diterima (nilai yang dibayarkan investor)
 Nilai Nominal : Nilai jatuh tempo
 Tingkat Diskonto : Selisih yang dibayarkan dengan nilai yang tertera dalam suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
 Nilai Diskonto : Nilai nominal-nominal tunai

F. Hubungan antar Variabel

1. Hubungan antara pendapatan perkapita dengan penerimaan Pajak Penghasilan.

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih relatif tinggi. Padahal, pemerintah sudah berusaha menekan angka kemiskinan dengan memacu perekonomian dalam dua dekade terakhir. Salah satu pangkal masalahnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, orang kaya selama ini mudah menyembunyikan hartanya. Berdasarkan kajian Oxfam dan *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID), pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang 20 tahun mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 40 persen menjadi sebesar delapan persen pada tahun 2014.

Namun, kedua lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu juga menyebut adanya kesenjangan ekonomi yang lebar antara segelintir orang terkaya dengan mayoritas penduduk Indonesia. Kekayaan empat orang terkaya setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Director of Economics Analysis and Operational Support Division Asian

Development Bank (ADB) Edimon Ginting mengatakan, secara sederhana, ketimpangan pendapatan di Indonesia terjadi karena pendapatan masyarakat kaum kelas atas di Indonesia naik lebih cepat jika dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah.

Pembiayaan pembangunan di Indonesia sangatlah bergantung terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pemasukan dana kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai anggaran belanja negara (APBN) (Syahab dalam Sarizaen, 2012:1). Namun meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tapi penerimaan pajak di Indonesia tetap masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Dikarenakan terdapat kesenjangan pendapatan perkapita antara si miskin dengan si kaya. “Kenaikan PDB perkapita itu karena 20 persen masyarakat teratas tumbuhnya jauh lebih cepat. Masyarakat terbawah tidak tumbuh, atau bahkan menurun. Cara mengukur pendapatan perkapita adalah total pendapatan dibagi penduduk. Kalau dilihat *size* memang meningkat, tapi masih ada kesenjangan sehingga yang menikmati hanya 20 persen teratas“ , Enny (2017). Hal senada disampaikan oleh *Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), Yustinus Prastowo. Melihat peningkatan pendapatan di satu sisi dan melebarnya ketimpangan di sisi lain, pemerintah harus

segera merumuskan kebijakan fiskal yang pro-pemerataan. Di Indonesia problem utamanya adalah. Pertama, orang kaya belum membayar pajak. Kedua, redistribusi tidak berjalan baik.

Ukuran yang lebih tepat untuk mengukur kemakmuran suatu negara adalah dengan menghitung pendapatan perkapitanya. Sedangkan terdapat masalah kesenjangan pendapatan perkapita antara si kaya dan si miskin. Si kaya makin kaya dan si miskin semakin menurun. Seperti halnya yang di paparkan di atas juga bisa memiliki dampak terhadap pembayaran pajak nya sesuai si kaya dan si miskin. Berikut adalah Undang-undang yang mengatur besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 yang masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 9. Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber : Sumber : *Undang-Undang Perpajakan (2009)*

Sedangkan besar pajak yang dibayarkan berdasarkan Pajak penghasilan Orang Pribadi (OP). Penerimaan Negara itu sendiri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun masa pajak (Resmi, 2005:74).

Karena pajak itu sendiri sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendapatan nasional perkapita masyarakat menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dampak langsung dari pungutan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel maka konsumsi relatif menjadi turun pula. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Demikian pula jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional. Tentu saja hal ini dengan asumsi jika komponen lain yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional tidak berubah. Artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah.

Pendapatan Perkapita ialah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita ini merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Dalam rangka mencapai kemakmuran suatu negara, usaha peningkatan pendapatan nasional harus disertai dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali, maka peningkatan pendapatan perkapita juga tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan bisa terjadi pendapatan perkapitanya menurun. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tingkat pertumbuhannya tidak melebihi pendapatan nasionalnya.

2. Hubungan antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dengan penerimaan Pajak Penghasilan.

Fisher dan Mishkin (2006: 414) memberikan uraian bahwa perubahan pada suku bunga riil berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Naik turunnya tingkat suku bunga dan pengaruhnya terhadap konsumsi dipengaruhi oleh dua efek, yakni efek pendapatan dan efek substitusi. Efek pendapatan berupa perubahan konsumsi yang terjadi karena ketika pendapatan naik dan suku bunga naik maka konsumen lebih memilih untuk menabung dan mengurangi konsumsi. Konsumen akan memperbesar konsumsi ketika konsumsi tersebut ditujukan untuk barang-barang normal. Efek substitusi menggambarkan bahwa perubahan konsumsi terjadi akibat perbedaan harga relatif di berbagai periode. Ketika barang di periode sekarang relatif tinggi disebabkan oleh tingginya tingkat

suku bunga, maka konsumen akan cenderung mengurangi konsumsi dan memperbesar tabungan. Hal ini dilakukan dengan harapan konsumen dapat melakukan konsumsi yang lebih di periode mendatang. Efek substitusi mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan konsumsi di masa sekarang atau masa mendatang. Konsumsi, yang di pengaruhi oleh tingkat suku bunga, merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Bruto yakni $Y = C + I + G + (X - M)$.

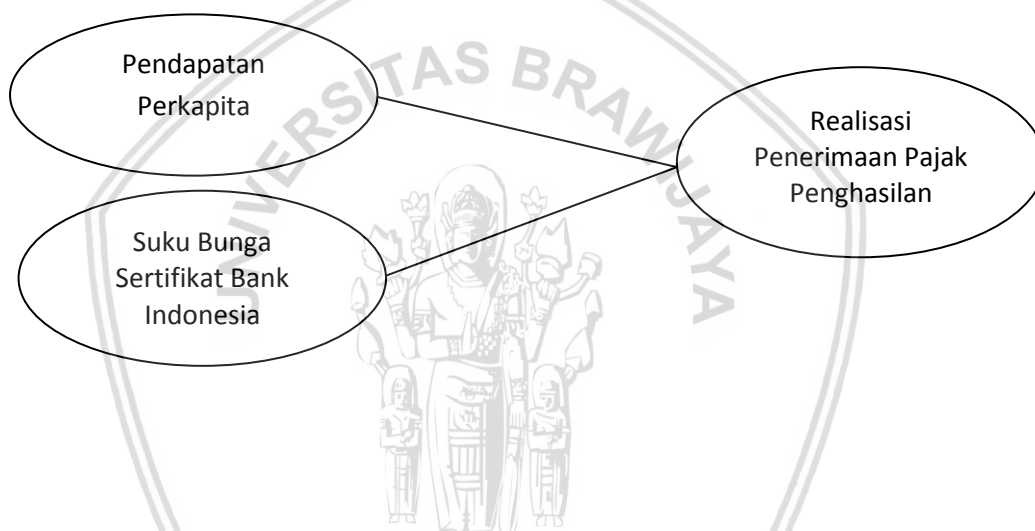
Tingkat suku bunga juga berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat (Sukirno, 2006: 25). Jika suku bunga rendah, maka jumlah uang yang beredar akan tinggi dan investasi akan bertambah, hal ini berakibat pada peningkatan pengeluaran (*output*) secara agregat sehingga kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran dapat ditekan. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar terlalu tinggi (*inflasi*) maka suku bunga dapat ditingkatkan untuk menurunkan investasi dan pengeluaran agregat sehingga uang yang beredar dapat dikendalikan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi negara, yang dapat mendorong penerimaan pajak agar optimal.

Hidayat (2006) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mempunyai pengaruh yang rendah dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hampir sama dengan itu, Ferdiawan (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Artinya,

apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun maka penerimaan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan.

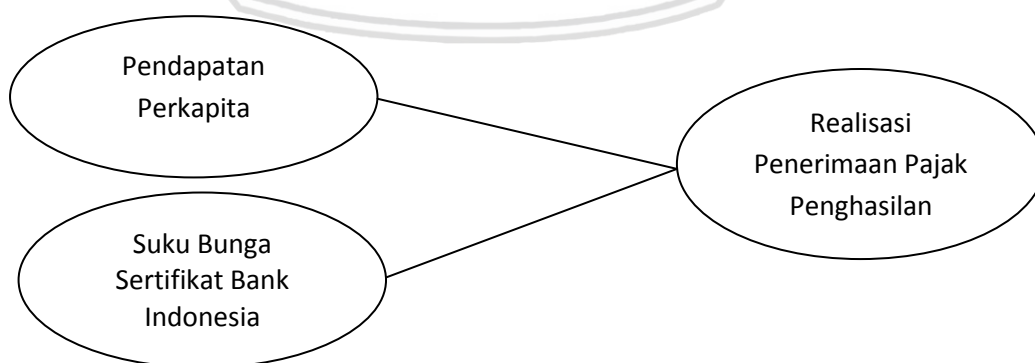
G. Model Konsep dan Variabel

1. Model Konsep



Gambar 2. Model Konsep (2018)

2. Model Hipotesis



Gambar 3. Model Hipotesis (2018)

Dugaan sementara untuk penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilannya.

H₂: Apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang bermaksud mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2013). Penelitian penjelasan ini sesuai untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dengan menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan ini dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) (Azwar, 2010:5). Penelitian penjelasan didasarkan pada hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2012:21) penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Sedangkan karakteristik penelitian ini bersifat replikasi, sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang diulang dengan kondisi lain yang kurang lebih sama. “Penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya” (Arikunto, 2011:10).

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah website badan pusat statistika (BPS), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kementerian keuangan. Mengingat data yang diperlukan untuk penelitian ini diadapatkan pada situs resmi pajak.go.id, bps.go.id. dan kemenkeu.go.id alasan pemilihan direktorat jenderal pajak, badan pusat statistika, dan kementerian keuangan sebagai lokasi penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa kedua instansi tersebut merupakan instansi pemerintah yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh peneliti, yakni data pendapatan perkapita, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan penerimaan Pajak Penghasilan.

C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang tersedia dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas), berikut akan diuraikan :

a. Variabel Terikat

Variabel ini bisa disebut dengan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

b. Variabel Bebas

Variabel ini bisa disebut dengan variabel independen yang merupakan variabel pengaruh terhadap variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah faktor ekstern yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan. Variabel bebas tersebut adalah ;

X1 = Pendapatan Perkapita

X2 = Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia

2. Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah variabel variabel yang berhubungan dengan masalah dan penelitian.

a. Variabel Independen

1. Pendapatan Perkapita (X1)

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, Waluyo (2011). Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan perkapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat.

2. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X2)

Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Bunga dari sisi penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana akan menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran yang tinggi. Sedangkan bunga dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman atau jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. Bunga merupakan harga yang dibayar atas modal. Seperti yang dikemukakan oleh H. Freud Wiston dan Eugene F. Brigham (1993:80) bahwa “Suku bunga adalah harga yang dibayarkan atas modal serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari suatu ekuitas”.

3. Skala Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Sugiyono (2009:98) adalah: “Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur”. Skala ini digunakan untuk menyusun objek secara runtut dari tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Adapun ciri-ciri dari skala ordinal antara lain: kategori data saling memisah, kategori data memiliki aturan yang logis, kategori

data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang berdasarkan jumlah relatif karakteristik yang berbeda pada setiap objek yang dimiliki.

Berikut ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dimana kedua variabel berbentuk peringkat (rank) atau kedua variabel berskala ordinal (Uyanto, 2009). Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal (non parametik). Berikut adalah tabel kriteria terima dan tolak hipotesis tersebut :

Tabel 10. Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis

No	Parameter	Nilai	Interpretasi
1.	ρ_{hitung} dan ρ_{tabel} . ρ_{tabel} dapat dilihat pada Tabel J (Tabel Uji Rank Spearman) yang memuat ρ_{tabel} , pada berbagai n dan tingkat kemaknaan α	$\rho_{hitung} \geq \rho_{tabel}$	H_0 ditolak H_a diterima
		$\rho_{hitung} < \rho_{tabel}$	H_0 diterima H_a ditolak
2.	Kekuatan korelasi ρ_{hitung}	0.000-0.199	Sangat Lemah
		0.200-0.399	Lemah
		0.400-0.599	Sedang
		0.600-0.799	Kuat
		0.800-1.000	Sangat kuat
3.	Arah Korelasi ρ_{hitung}	+ (positif)	Searah, semakin besar nilai x_i semakin besar pula nilai y_i
		- (negatif)	Berlawanan arah, semakin besar nilai x_i semakin kecil nilai y_i , dan sebaliknya

Sumber : Sugiyono (2013)

Supaya lebih mudah dipahami, maka interpretasi output uji korelasi rank spearman ini saya bagi menjadi tiga tahap interpretasi :

- 1.Melihat tingkat kekuatan (keeratan) hubungan antar variabel
- 2.Melihat arah (jenis) hubungan antar variabel
- 3.Melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan adalah data pendapatan perkapita, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan penerimaan Pajak Penghasilan secara nasional dalam kurun waktu januari 2005 sampai dengan desember 2016, sebanyak 12 tahun karena data yang digunakan adalah data tahunan maka jumlahnya menjadi 12 tahun. Sampel yang digunakan merupakan sampel jenuh. Maka dari itu sampel yang digunakan sama dengan populasi yaitu 12 tahun. Berikut perhitungannya, Sugiyono (2013):

$$\frac{\text{Sampel}}{\text{Jumlah}} = \frac{\text{Populasi}}{\text{Jumlah}}$$

E. Jenis dan Sumber Data

“Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data ini perlu disusun dan disimpan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan segera dapat dicari

kembali dengan mudah dan cepat” (Kuncoro, 2006:145). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut (Purhantara, 2010), data sekunder yaitu data diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, sudah jadi dan biasanya data tersebut sudah dipublikasikan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa *time series*. “Data *time series* adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu” (Kuncoro, 2009:146). Data sekunder diperoleh dari institusi yang terkait akan hal-hal yang diteliti oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan merupakan data eksternal. “Pengertian dari data eksternal adalah data sekunder yang berasal dari institusi di luar perusahaan, misalnya lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga pelayanan data” (Kuncoro, 2009:154). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian keuangan dan website resmi Direktorat Jenderal Pajak berupa data penerimaan Pajak Penghasilan, pendapatan per kapita, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang menunjukkan sesuatu yang abstrak (Arikunto, 2011). Pada penelitian ini digunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data pendapatan per kapita yang didapatkan dengan cara mengakses *website* (bps.go.id), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia

dengan cara mengakses *website*(kemenkeu.go.id)dan data penerimaan Pajak Penghasilan dari (pajak.go.id).

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Korelasi Rank Spearman

Uji ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dimana kedua variabel berbentuk peringkat (rank) atau kedua variabel berskala ordinal (Uyanto, 2009), dan juga mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal (non parametik). Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) dan negatif (-).Korelasi yang menghasilkan angka positif berarti hubungan kedua variabel bersifat searah, yang berarti jika variabel bebas besar maka variabel terikat juga besar. Korelasi yang menghasilkan angka negatif berarti hubungan kedua variabel tidak searah, yang berarti jika variabel bebas besar maka variabel terikat menjadi kecil.Uji signifikansi Spearman menggunakan uji Z karena distribusinya mendekati distribusi normal. Kekuatan hubungan antara variabel ditunjukkan melalui nilai korelasi. Berikut adalah tabel nilai korelasi makna nilai tersebut :

Tabel 11. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : *Sugiyono (2002:183)*

Langkah Langkah Penggunaan Korelasi Rank Spearman :

- Menentukan formulasi hipotesis (H1 dan H0)
- Menentukan taraf nyata ($\alpha = 0,05$) untuk menentukan tabel
- Menyusun tabel penolong untuk menentukan hitung
- Menghitung nilai hitung dengan rumus :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (\text{Husein Umar, 2002:321})$$

Dimana :

r_s = koefisien korelasi Spearman

Σ = notasi jumlah

d_i = perbedaan rangking antara pasangan data

n = banyaknya pasangan data

Jika terdapat Rank Kembar dalam perangkian untuk kedua variabel (baik X maupun Y), harus digunakan faktor koreksi yang mengharuskan kita menghitung $\sum X^2$ dan $\sum Y^2$ terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya r_s .

$$\sum X^2 = \frac{n(n^2 - 1)}{12} - \sum TX \quad \sum Y^2 = \frac{Nn(n^2 - 1)}{12} - \sum TY$$

Besarnya T dalam perumusan diatas merupakan faktor koreksi bagi tiap kelompok dengan angka yang sama dirumuskan sebagai berikut :

$$T = \frac{T^3 - t}{12}$$

Dimana t = Jumlah variabel yang mempunyai angka yang sama, maka Korelasi Spearman kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum X_2 * \sum Y_2}} \quad (\text{Husein Umar, 2002:325})$$

Besarnya koefisien Korelasi Spearman (r_s) bervariasi yang memiliki batasan antara $-1 < r < 1$, interpretasikan dan nilai koefisien korelasinya adalah :

1. Jika nilai $r > 0$

Artinya telah terjadi hubungan yang linier positif, yaitu makin besar nilai variabel X (*independent*) maka besar pula nilai variabel Y (*dependent*), atau makin kecil nilai variabel X (*independent*) maka makin kecil pula nilai variabel Y (*dependent*).

2. Jika nilai $r < 0$

Artinya telah terjadi hubungan yang linier negatif, yaitu makin kecil nilai variabel X (*independent*) maka makin besar nilai variabel Y (*dependent*), atau makin besar nilai variabel X (*independent*) maka makin kecil pula nilai variabel Y (*dependent*).

3. Jika nilai $r = 0$

Artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X (*independent*) dengan variabel Y (*dependent*).

4. Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$,

Artinya telah terjadi hubungan linier sempurna berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin mengarah ke angka 0 maka garis makin tidak lurus.

Hipotesis nihil yang akan diuji mengatakan bahwa dua variabel yang diteliti dengan nilai jenjangnya itu independen, tidak ada hubungan antara jenjang variabel yang satu dengan jenjang dari variabel lainnya.

- a) Bila hitung $>$ tabel, maka H_1 diterima
- b) Bila hitung $<$ tabel, maka H_0 diterima



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Situs Website Resmi Pemerintah

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah website badan pusat statistika (BPS), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kementerian keuangan. Mengingat data yang diperlukan untuk penelitian ini didapatkan pada situs resmi pajak.go.id, bps.go.id. dan kemenkeu.go.id alasan pemilihan direktorat jenderal pajak, badan pusat statistika, dan kementerian keuangan sebagai lokasi penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa kedua instansi tersebut merupakan instansi pemerintah yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh peneliti, yakni data pendapatan perkapita, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan penerimaan Pajak Penghasilan.

Deskripsi Data Penelitian

B. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan maupun orang pribadi. Untuk dapat mencapai tujuan nya, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia

menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak, dan berikut adalah data penerimaan Pajak Penghasilan selama tahun 2005-2016 :

Tabel 12. Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam Miliar Rupiah)
1	2005	180,253
2	2006	213,698
3	2007	251,748
4	2008	327,498
5	2009	317,615
6	2010	357,046
7	2011	431,122
8	2012	465,070
9	2013	506,443
10	2014	546,181
11	2015	602,308
12	2016	666,212

Sumber : *bps.go.id* (2018)

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2005 rata-rata penerimaan pajak adalah Rp.180.253.000.000 miliar rupiah yang merupakan nilai terendah pada rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2005-2016. Tahun 2006 penerimaan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp.33.445.000.000 miliar rupiah selanjutnya pada tahun 2007

sampaidengan tahun 2016 berturut mengalami kenaikan dari Rp.75.750.000.000rupiah, Rp.9.853.000.000 rupiah, Rp.39.431.000.000 rupiah, Rp.74.076.000.000 rupiah, Rp.33.948.000.000 rupiah, Rp.41.373.000.000 rupiah, Rp.39.738.000.000 rupiah, Rp.56.127.000.000 rupiah, Rp.63.904.000.000 rupiah.

a. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Pada penelitian ini tingkat pendapatan perkapita akan digambarkan oleh jumlah pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada periode 2005-2016 terus mengalami kenaikan.

Tabel 13. Pendapatan Nasional Perkapita (PDB Perkapita dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Nasional Perkapita (dalam miliar rupiah)
1	2005	11.010.476.78
2	2006	13.008.853.48
3	2007	15.223.494.38
4	2008	19.087.875.69
5	2009	20.935.863.42
6	2010	23.974.407.31
7	2011	27.487.046.94
8	2012	30.674.674.07
9	2013	32.463.736.28
10	2014	41.900.000.00
11	2015	45.200.000.00
12	2016	48.000.000.00

Sumber : *bps.go.id (2018)*

Berdasarkan tabel tersebut pendapatan perkapita stabil dan semakin meningkat setiap tahunnya. Laju pendapatan perkapita yang mengalami kenaikan cukup pesat ada pada tahun 2011 sebesar Rp.3.512.639.63 rupiah dan 2014 sebesar Rp.9.436.263.72 rupiah.

3. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

Suku bunga ialah biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya (Mishkin, 2008). Suku bunga sangat mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga rendah akan

mendorong minat masyarakat melakukan investasi, membuka usaha yang akan dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung. Sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat, dan untuk melakukan investasi akan menurun. Berikut adalah *rate* suku bunga dari tahun 2005-2016 :

Tabel 14. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (dalam Persen)

No	Tahun	BI rate (dalam persen)
1	2005	12,75 %
2	2006	9,75 %
3	2007	8,00 %
4	2008	9,25 %
5	2009	6,50 %
6	2010	6,50 %
7	2011	6,00 %
8	2012	5,75 %
9	2013	7,50 %
10	2014	7,75 %
11	2015	7,50 %
12	2016	6,50 %

Sumber : *bps.go.id* (2018)

Berdasarkan tabel tersebut tahun 2005 BI *rate* berada pada angka 12.75% dan kemudian turun menjadi 9.75% pada tahun 2006. Tahun 2007 BI *rate* mengalami penurunan sebesar 1.75% dan mengalami kenaikan 1.25 % pada tahun 2008, ditahun 2009 mengalami penurunan drastis sebesar 2.75% dan masih terus mengalami kondisi tidak stabil sampai tahun 2013 baru

mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1.75% dengan kondisi stabil sampai tahun 2015. Pada tahun terakhir 2016 mengalami penurunan 1% tepatnya di angka 6.50%.

C. Uji Statistik dan Pembahasan

1. Uji Korelasi Rank Spearman

Uji ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dimana kedua variabel berbentuk peringkat (rank) atau kedua variabel berskala ordinal (Uyanto, 2009). Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal (non parametik). Berikut adalah tabel kriteria terima dan tolak hipotesis tersebut :

Tabel 15. Kriteria Terima dan Tolak Hipotesis

No	Parameter	Nilai	Interpretasi
1.	ρ_{hitung} dan ρ_{tabel} . ρ_{tabel} dapat dilihat pada Tabel J (Tabel Uji Rank Spearman) yang memuat ρ_{tabel} , pada berbagai n dan tingkat kemaknaan α	$\rho_{hitung} \geq \rho_{tabel}$	Ho ditolak Ha diterima
		$\rho_{hitung} < \rho_{tabel}$	Ho diterima Ha ditolak
2.	Kekuatan korelasi ρ_{hitung}	0.000-0.199	Sangat Lemah
		0.200-0.399	Lemah
		0.400-0.599	Sedang
		0.600-0.799	Kuat
		0.800-1.000	Sangat kuat
3.	Arah Korelasi ρ_{hitung}	+ (positif)	Searah, semakin besar nilai x_i semakin besar pula nilai y_i
		- (negatif)	Berlawanan arah, semakin besar nilai x_i semakin kecil nilai y_i , dan sebaliknya

Sumber : Sugiyono (2013)



Kesimpulan :

- a. Terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Perkapita (X_i) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah:terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Pendapatan Perkapita (X_i) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Jika arah korelasi ρ_{hitung} positif (+), maka searah dan semakin besar nilai X_i semakin besar pula nilai Y_i . Atau dengan kata lain bahwa variabel Pendapatan Perkapita mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pajak Penghasilan. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilannya.

- b. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah: terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Jika arah korelasi ρ_{hitung} negatif (-), maka berlawanan arah dan semakin besar nilai X_2 semakin kecil nilai Y_i , dan sebaliknya. Atau dengan kata lain bahwa variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan Pajak Penghasilan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Variabel Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan beserta hasil penelitian terdahulu sebagai pembandingan.

a. Penelitian Terdahulu

- a. Prastyo Bangun Nuswantara (2011: Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Surabaya

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Wajib Pajak (X1), Upah Minimum Regional (X2), pendapatan perkapita (X3), dan jumlah penduduk (X4), berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

- b. Rakiman (2011) : Pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2002-2010.

Berdasarkan penelitian ini dibuktikan bahwa pendapatan perkapita dan jumlah wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

b. Hasil Penelitian

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih relatif tinggi. Padahal, pemerintah sudah berusaha menekan angka kemiskinan dengan memacu perekonomian dalam dua dekade terakhir. Salah satu pangkal masalahnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, orang

kaya selama ini mudah menyembunyikan hartanya. Berdasarkan kajian Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang 20 tahun mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 40 persen menjadi sebesar delapan persen pada tahun 2014.

Sedangkan pembiayaan pembangunan di Indonesia sangatlah bergantung terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pemasukan dana kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk mendanai anggaran belanja negara (APBN) (Syahab dalam Sarizaen, 2012:1). Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menekan kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Salah satunya dengan menerapkan pajak progresif alias bertingkat atas pendapatan masyarakat dan memperbesar alokasi anggaran untuk pemerintah daerah (pemda). Selain itu juga peningkatan akses pembiayaan ke UMKM, dan lebih efektif lagi yaitu dengan fiskal pajak.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip *ability to pay*. Adapun perbaikan redistribusi pendapatan bisa dilakukan melalui alokasi belanja public yang baik dalam APBN/APBD. Menurut Prastowo (2018), seharusnya terhadap struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) diterapkan sistem pajak progresif. Kemudian, otoritas pajak bekerjasama dengan

PPATK agar bisa efektif menjangkau transaksi keuangan. Dan sebaiknya pemerintah menurunkan tarif pajak penjualan (PPN), untuk mendorong daya beli masyarakat. Terakhir perbanyak insentif yang berdampak besar pada peningkatan pendapatan masyarakat banyak.

Jadi, semakin tinggi pendapatan seseorang maka tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Dengan kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan tinggi semestinya berkontribusi lebih kepada penerimaan negara yang akan dimanfaatkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Meski begitu, Sri Mulyani memahami, kebijakan itu tak lantas menekan kemiskinan dan ketimpangan. Pangkal soalnya, orang dengan penghasilan tinggi mudah menghindari pajak dengan memindahkan hartanya ke negara suaka pajak (*tax haven*).

Berdasarkan analisis yang dilakukan pendapatan perkapita merupakan salah satu faktor yang berhubungan langsung signifikan dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Peningkatan pendapatan perkapita akan diikuti dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Bahkan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh penulis menunjukkan keterkaitan signifikan antara variabel pendapatan nasional perkapita terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian Prastyo (2011) yang menyimpulkan bahwa pendapatan perkapita mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan secara nyata, dan

penelitian dari Sethy dan Rimpay (2007) memperoleh kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan perkapita suatu negara berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Hal ini akan memberikan pengaruh positif dalam penerimaan suatu negara khususnya penerimaan dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilannya. Begitupun sebaliknya, apabila nilai pendapatan nasional perkapita menurun berakibat pada pengangguran semakin tinggi. Karena pengangguran yang semakin tinggi tersebut berdampak pada jumlah orang yang membayar Pajak Penghasilan semakin berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun menjadi berkurang.

Sedangkan besar pajak yang dibayarkan berdasarkan Pajak penghasilan Orang Pribadi (OP). Penerimaan Negara itu sendiri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh pasal 21. Karena pajak itu sendiri sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendapatan nasional perkapita masyarakat menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dampak langsung dari pungutan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel maka konsumsi relatif

menjadi turun pula. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Demikian pula jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional. Tentu saja hal ini dengan asumsi jika komponen lain yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional tidak berubah. Artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah.

Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Perkapita (X_i) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah: terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Pendapatan Perkapita (X_i) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) diterima. Jika arah korelasi ρ_{hitung} positif (+), maka searah dan semakin besar nilai X_i semakin besar pula nilai Y_i . Atau dengan kata lain bahwa variabel Pendapatan Perkapita mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pajak Penghasilan. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilannya.

2. Variabel Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan beserta penelitian terdahulu sebagai pembandingan.

a. Penelitian Terdahulu

1. Rahmanta (2012) : Pengaruh Produk Domestik Bruto dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan pajak di indonesia.

Kesimpulan penelitian ini produk domestik bruto dan tingkat suku bunga suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak secara simultan. Dan berdasarkan hasil uji parsial diperoleh bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

b. Hasil Penelitian

Variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan Pajak Penghasilan ternyata memiliki pengaruh yang bersifat negatif dan tidak signifikan. Artinya, apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun maka penerimaan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan.

Resiko yang terdapat dalam permasalahan tersebut adalah menghambat pertumbuhan kredit dan hal ini sangat mengganggu bisnis para pengusaha khususnya dalam hal jual beli dikarenakan daya beli masyarakat rendah, sehingga keuntungan menjadi kecil, pajak yang dikenakan pun menjadi kecil. Jika suku bunga tinggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan dananya di bank karena ia dapat mengharapkan pengembalian yang menguntungkan sehingga permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena masyarakat sibuk mengalokasikannya ke dalam bentuk portofolio perbankan (deposito dan tabungan). Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga yang tinggi di satu sisi, akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat, di lain pihak minat masyarakat untuk melakukan investasi akan menurun. Sebaliknya tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong minat masyarakat untuk melakukan investasi, membuka usaha atau kegiatan sejenisnya yang akan dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Penghasilan.

Fisher dan Mishkin (2006: 414) memberikan uraian bahwa perubahan pada suku bunga riil berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Naik turunnya tingkat suku bunga dan pengaruhnya terhadap konsumsi dipengaruhi oleh dua efek, yakni efek pendapatan

dan efek substitusi. Efek pendapatan berupa perubahan konsumsi yang terjadi karena ketika pendapatan naik dan suku bunga naik maka konsumen lebih memilih untuk menabung dan mengurangi konsumsi. Konsumen akan memperbesar konsumsi ketika konsumsi tersebut ditujukan untuk barang-barang normal. Efek substitusi menggambarkan bahwa perubahan konsumsi terjadi akibat perbedaan harga relatif di berbagai periode. Ketika barang di periode sekarang relatif tinggi disebabkan oleh tingginya tingkat suku bunga, maka konsumen akan cenderung mengurangi konsumsi dan memperbesar tabungan. Hal ini dilakukan dengan harapan konsumen dapat melakukan konsumsi yang lebih di periode mendatang. Efek substitusi mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan konsumsi di masa sekarang atau masa mendatang. Konsumsi yang di pengaruhi oleh tingkat suku bunga, merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni $Y = C + I + G + (X - M)$.

Hidayat (2006) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mempunyai pengaruh yang rendah dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hampir sama dengan itu, Ferdiawan (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Artinya, apabila tingkat suku bunga Sertifikat

Bank Indonesia mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun maka penerimaan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan.

Kesimpulan dari perhitungan peneliti adalah Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah: terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Jika arah korelasi ~~positif~~ negatif (-), maka berlawanan arah dan semakin besar nilai X_2 semakin kecil nilai Y_i , dan sebaliknya. Atau dengan kata lain bahwa variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan Pajak Penghasilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan nasional perkapita dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap penerimaan Pajak Penghasilan mulai dari periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2016 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Perkapita (X_1) dengan Pajak Penghasilan (Y_i), terbukti mampu memberikan hubungan yang positif. Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah: terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Pendapatan Perkapita (X_1) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) diterima. Jika arah korelasi ρ_{hitung} positif (+), maka searah dan semakin besar nilai X_1 semakin besar pula nilai Y_i . Atau dengan kata lain bahwa variabel Pendapatan Perkapita mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pajak Penghasilan. Semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilannya.
2. Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) terbukti mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y_i). Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah: terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) dengan Pajak Penghasilan (Y_i). Dengan demikian

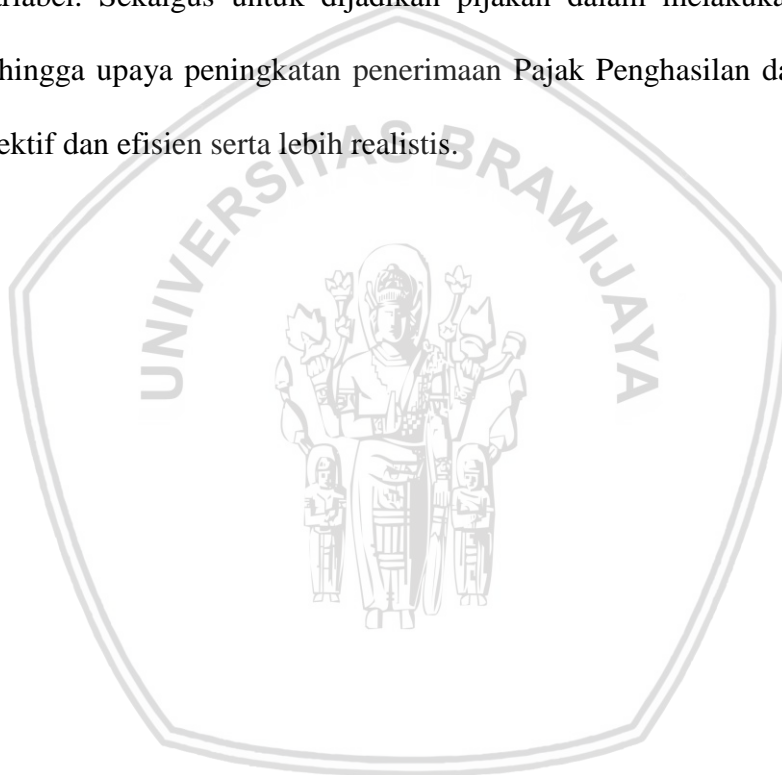
hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Jika arah korelasi ρ_{hitung} negatif (-), maka berlawanan arah dan semakin besar nilai (X_2) semakin kecil nilai Y_i , dan sebaliknya. Atau dengan kata lain bahwa variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan Pajak Penghasilan. Apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_2) mengalami kenaikan maka mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan (Y_i). Sebaliknya apabila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia turun maka penerimaan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti mencoba memberikan saran-saran atas hasil dari penelitian ini, baik kepada pemerintah maupun pengusaha dan juga untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut, berikut adalah saran-saran yang diberikan oleh peneliti :

1. Sebaiknya pemerintah dalam menentukan jumlah target penerimaan Pajak Penghasilan harus lebih memperhatikan indikator ekonomi makro yang sedang terjadi seperti pendapatan nasional perkapita dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia agar lebih realistis sesuai dengan perkembangan perekonomian karena penetapan target penerimaan pajak yang tidak realistis akan berdampak pada kegagalan dalam pencapaian realisasinya sehingga dapat menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi budgeter.

2. Karena variabel pendapatan nasional perkapita merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan maka pemerintah harus berusaha menjaga agar pertumbuhan ekonomi negara berada dalam kondisi yang stabil
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan lebih banyak variabel. Sekaigus untuk dijadikan pijakan dalam melakukan perbaikan sehingga upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan dapat berjalan efektif dan efisien serta lebih realistis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*. Jakarta; PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyono, Eddy. (2013). *Geliat Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia*.
<http://economy.okezone.com>, diakses tanggal 19 Oktober 2016.
- Hanafi, Mamduh. *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta : BPFE.
- Husein Umar. 2002. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kaman, Naigolan dkk. 2005. *Teori Ekonomi Makro Edisi Pertama*. Bantul : Pondok Edukasi
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Murni, Asifa. 2006. *Ekonomi Makro*, Bandung : Refika Aditama
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, R., Sugiharti, D.K. (2007). *Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2011. *Ekonomii Makro (Suatu Pengantar)*. Jakatra : PT Raja Grafindo Persada
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Karya Tulis Ilmiah

- Ferdiawan, Mohammad. 2015. *Pengaruh Tingkat Inflasi Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Pajak Penghasilan* : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Hidayat, Khomairul. 2006. Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI Fluktuasi Kurs dolar AS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Pinilih, Sukowati. 2016. *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan* : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Permatasari, Gita. 2011. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia* : Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- PrastyoNuswantara, Bangun. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dikota Surabaya.*Skripsi*.Jawa Timur; UPN Veteran.
- Purnama Sari, Gita. (2011). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia.*Skripsi*.Bandung; Garuda Dikti.
- Rahmanta (2012).Pengaruh Produk Domestik Bruto dan SBI Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia.QE Journal, vol. 1 (no. 1).
- Rotuahman, Henry. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah. Investasi, Sumber Penghasilan Perusahaan dan Sumber Pendapatan Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan* : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sarsiti, Rakiman. 2011. Pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Di Kabupaten Sukoharjo periode 2002-2010.*Working Paper*. Sukoharjo.
- Sinaga, A. R. 2010. *Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia* : Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pasal 3 ayat 1 (satu).
- S.K Direksi BI No. 31/67/Kep/DIR tertanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi rupiah.
- Undang-Undang Perpajakan 2009 tentang tarif progresif Pajak Penghasilan.

UU PPh pasal 31 E tentang fasilitas pengurangan PPh Badan.

Pemotong PPh pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008
Pemotong PPh pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008

Internet

[http: //www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), diakses pada 11 Februari 2018

[http: //www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com), diakses pada 3 Maret 2018

[http: //www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses pada 3 Maret 2018

[http: //www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada 13 Februari 2018

[http: // www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada 13 Februari 2018

[http: // www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses pada 13 Februari 2018

